
**PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH
DAERAH DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN DAERAH
(Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya)**

Raibbatol Advia¹, Agus Satrya Wibowo², M. Ihsan Diarsyad³

^{1,2,3}*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya*

Article Info

Article history:

Received November 20th, 2021

Revised December 10th, 2022

Accepted December 22th, 2022

Keywords:

*Government Accounting,
Standards, Competence Human
Resources, Good Governance,
Quality of Financial Report*

ABSTRACT

The effect of applying government accounting standards, competence human resources, and good governance on quality of regional financial reports (Empirical Study at the Palangka Raya City). Thesis, Department of Accounting, Faculty of Economics and Business. This study aims to provide an empirical explanation of applying government accounting standards, competence human resources, and good governance affect the quality of financial reports. The study had a population of 18 Palangka Raya City Offices. This study uses primary data in the form of a questionnaire with a purposive sampling method, which is the sample obtained is 72 people. The data analysis technique in this research is causality analysis, validity and reliability of the instrument test and multiple linear analysis. The results of this study indicate that the government accounting standards, competence human resources, and good governance affect the quality of financial reports. Furthermore, it is suggested for further researchers to develop a sample and is expected to be able to test it with other variables outside the research.

©2022

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author:

Agus Satrya Wibowo

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: satrya.upr@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menilai kualitas pelaporan keuangan pemerintah Indonesia masih rendah padahal situasi ini dapat menjadi peluang terjadinya tidak pidana korupsi (Wilda Fizriyani, Jumat 04 Mei 2018). Dengan demikian kualitas laporan keuangan sangat penting untuk memitigasi, terjadinya korupsi hal ini karena laporan keuangan merupakan bentuk dari transparansi pemerintah terhadap masyarakat untuk itu agar transparansi kepada publik semakin kuat dengan pelaporan keuangan, peran dari badan pemeriksa keuangan (BPK) harus ditingkatkan dalam melakukan pemeriksaan.

Laporan Keuangan pemerintah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, oleh karena itu selain tenaga-tenaga akuntansi terampil, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman mengelola keuangan. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas pemerintah harus memenuhi sistem pembukuan mengikuti standar akuntansi

pemerintah. Berikut ini digambarkan skema keterkaitan antar variabel penelitian. (Jurnal Ilmiah WIDYA Ekonomika, 02 Desember 2017).

Fenomena pada penelitian ini yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun anggaran 2018 dinyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI). Opini WTP yang dinyatakan oleh BPK-RI tersebut disimpulkan dari penyusunan LKPD Provinsi Kalteng yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, yang telah diungkapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan.

Selain itu, dalam LKPD Provinsi Kalteng tahun anggaran 2018, telah disusun dan dirancang unsur-unsur sistem pengendalian intern (SPI), yakni lindungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi, dan pemantauan. "Pencapaian WTP ini adalah yang kelima kalinya bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini tentu menunjukkan komitmen Pemprov Kalteng dan SOPD-nya terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan," ujar Dori, Senin, 20 Mei 2019. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Tujuan diberlakukannya hal tersebut agar laporan keuangan yang dihasilkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah.

Faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sumber daya manusia yaitu kualitas aparatur daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap yang baik dalam bekerja.

Adapun faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu penerapan Good Governance (pemerintahan yang baik). Tata pemerintahan yang baik (terjemahan dari good governance) merupakan suatu kondisi yang menjamin adanya saling mengontrol yang dilakukan oleh komponen yakni pemerintah (government), rakyat (citizen) atau civil society dan usahawan (business) yang berada di sektor swasta.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Nordiawan (2010) Terdapat pengaruh antara SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan dilingkup pemerintahan baik pemerintah pusat dan departemen- departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ari Udianty (2014) menyatakan bahwa, dengan adanya standar akuntansi pemerintahan telah akuntabel yaitu mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan laporan keuangan, dan telah menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode, maka akan menghasilkan laporan yang baik. Studi yang dilakukan Roviyantie (2011) juga menunjukkan bahwa "kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan."

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Humairoh (2013) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa, Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

Penelitian sebelumnya dilakukan Usman abu bakar (2012) Menyatakan bahwa, dengan adanya Good Governance dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi stakeholder. Selain adanya transparansi, juga telah menganut prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan setiap rincian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang bahkan individu dan membuat laporan

keuangan guna melaporkan segala bentuk transaksi atau kegiatan yang telah terjadi selama satu periode pelaporan akuntansi. Menurut penelitian Usman abu bakar (2012), Taufeni Taufik dan Eka Hariyani (2015), penerapan Good Governance memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. KAJIAN PUSTAKA

Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang harus diterapkan dan dijadikan pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah karena mempunyai kekuatan hukum. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

“Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah), para pegawai (negeri), negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari, pemerintah pegawai negeri, alat negara, aparatur negara.”

Good Governance

“*Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. *Word bank* mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.”

Kualitas Laporan Keuangan

Laporan keuangan daerah adalah suatu pernyataan entitas pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah selama suatu periode (Nordian, dkk 2012). Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah dan pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dikelola.

Laporan keuangan yang diterbitkan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang lain.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan yang disajikan akan mudah dipahami sehingga kualitas laporan keuangan akan lebih baik, dengan adanya daya banding pembaca laporan keuangan tidak akan membingungkan dalam menganalisis kenaikan/penurunan saldo dari setiap akun yang ada pada laporan keuangan, dengan adanya keterpahaman maka laporan keuangan dapat dibaca secara umum karena disajikan sesuai standar yang berlaku, dengan adanya relevansi membuat laporan keuangan yang disajikan sesuai dengan standar keuangan yang berlaku sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih baik terhindar dari salah saji, dan dengan adanya keandalan pada penyajian laporan keuangan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi nyata suatu entitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Ari Udianty (2014) menyatakan bahwa, dengan adanya standar akuntansi pemerintahan telah akuntabel yaitu mampu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, mampu memenuhi kebutuhan pengguna akan laporan keuangan, dan telah menyajikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode, maka akan menghasilkan laporan yang baik.

H1 : Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Untuk menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan informasi yang andal sebagai salah satu indikator yang berkualitas, keterandalan disini menyangkut sumber daya manusia yang memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai atau paling tidak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan mengasah akuntansi, kompetensi aparatur sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang bernilai (andal).

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Humairoh (2013) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa, Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkualitas juga dapat menghemat waktu pembuatan laporan keuangan, disebabkan karena sumber daya manusia tersebut telah mengetahui dan memahami apa yang akan dikerjakan dengan baik sehingga penyajian laporan keuangan bisa tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan maka semakin baik untuk pengambilan keputusan.

H2 : Kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah

Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penelitian sebelumnya dilakukan Usman abu bakar (2012) Menyatakan bahwa, dengan adanya *Good Governance* dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi stakeholder. Selain adanya transparansi, juga telah menganut prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan setiap rincian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang bahkan individu dan membuat laporan keuangan guna melaporkan segala bentuk transaksi atau kegiatan yang telah terjadi selama satu periode pelaporan akuntansi.

H3 : *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

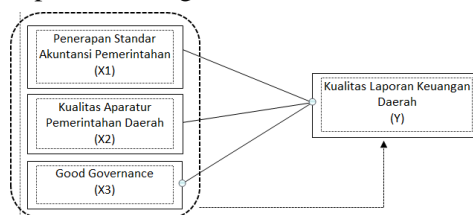
Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Nordiawan (2010) Terdapat pengaruh antara SAP dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yaitu SAP diterapkan dilingkup pemerintahan baik pemerintah pusat dan departemen- departemennya maupun di pemerintah daerah dan dinas-dinasnya. Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintahan pusat dan daerah.

Studi yang dilakukan Roviyantie (2011) juga menunjukkan bahwa “kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sehingga semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin tinggi kualitas laporan keuangan.”

Penelitian sebelumnya dilakukan Usman abu bakar (2012) Menyatakan bahwa, dengan adanya *Good Governance* dapat dibuktikan dengan adanya transparansi atau keterbukaan bagi stakeholder. Selain adanya transparansi, juga telah menganut prinsip akuntabilitas yaitu menetapkan setiap rincian tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bidang bahkan individu dan membuat laporan keuangan guna melaporkan segala bentuk transaksi atau kegiatan yang telah terjadi selama satu periode pelaporan akuntansi.

H4 : Standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.



Gambar 1. Model Penelitian

3. METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2) metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian survey. Dalam penelitian ini yang digunakan penulis adalah analisis kausalitas, uji validitas dan reliabilitas instrumen dan analisis linier berganda. Penelitian ini pendekatan deskriptif untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2), good governance (X3) dan kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah 1.648 yang terdaftar pada dinas kota Palangka Raya. Pemilihan sampel yang digunakan untuk menentukan jumlah sampel adalah Kepala dinas, Sekretaris dinas, Bendahara, dan Sub bagian akuntansi sehingga diperoleh jumlah sampel sebanyak 72 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (Field Research). Penelitian dilapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui Kuesioner.

Teknik Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*). Penelitian dilapangan adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data primer yaitu data yang diperoleh melalui Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, diberikan satu persatu kepada responden yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti.

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil pengujian dari 22 item kuesioner untuk variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah, *good governance*, dan kualitas laporan keuangan pada penelitian ini dinyatakan valid karena nilai *r* hitung (*pearson correlation*) > *r* tabel, maka instrumen dalam penelitian dinyatakan valid. Atau bisa juga dinyatakan valid apabila nilai *sig.* (*2-tailed*) atau angka signifikansi memiliki nilai dibawah 0,05 yang berarti setiap butir pertanyaan dalam instrumen penelitian dalam hal ini adalah kuesioner mampu mengukur variabel yang diharapkan.

Tabel 1. Uji Reliabilitas

No	Variabel	Cronbach Alpha	Kriteria	Keterangan
1	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,822	> 0,60	Reliabel
2	Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X2)	0,769	> 0,60	Reliabel
3	Penerapan <i>Good Governance</i> (X3)	0,830	> 0,60	Reliabel
4	Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)	0,624	> 0,60	Reliabel

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa yaitu nilai *cronbach alpha* dari setiap variabel lebih besar dari nilai 0,60. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel memenuhi syarat reliabilitas.

Tabel 2. Analisis Regresi Linear Berganda

	Unstandardized B	Sig.
Konstanta	0,326	0,844
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1)	0,238	0,000
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X2)	0,123	0,019
Penerapan <i>Good Governance</i> (X3)	0,303	0,000

Berdasarkan Tabel di atas maka diperoleh model persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 0,326 + 0,238X1 + 0,123X2 + 0,303X3$$

Dari persamaan regresi di atas dapat diketahui bahwa:

Nilai konstanta adalah 0,326, artinya jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) dan penerapan *good governance* (X3) bernilai 0, maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar 0,326 atau 32,6%. Koefisien regresi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) bernilai positif sebesar 0,238, artinya jika variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) mengalami kenaikan satu satuan dengan asumsi

variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) dan penerapan good governance (X3) dalam kondisi tetap atau konstan, maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,238 atau 23,8%.

Koefisien regresi variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) bernilai positif sebesar 0,123, artinya jika variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) mengalami kenaikan satu satuan dengan asumsi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan penerapan *good governance* (X3) dalam kondisi tetap atau konstan, maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,123 atau 12,3%.

Koefisien regresi variabel penerapan *good governance* (X3) bernilai positif sebesar 0,303, artinya jika variabel penerapan *good governance* (X3) mengalami kenaikan satu satuan dengan asumsi variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) dan kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) dalam kondisi tetap atau konstan, maka kualitas laporan keuangan daerah (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 30,3%.

Hasil Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis

	Pengujian	<i>Unstandardized B</i>	Nilai t_{hitung} dan F_{hitung}	Sig.	Standar Aturan	Kesimpulan
	(<i>Constant</i>)	0,326	0,197	0,844		
H1	Uji t	0,238	5,598	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H2	Uji t	0,123	2,400	0,019	< 0,05	Hipotesis Diterima
H3	Uji t	0,303	4,684	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
H4	Uji F		36,212	0,000	< 0,05	Hipotesis Diterima
Koefisien Determinasi		<i>Adjusted R Square</i> 0,608 (60,8%)				

Hasil Uji t (Uji Parsial)

Berdasarkan hasil dari t_{hitung} dan signifikansi uji statistik t pada Tabel 4.12 dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Uji Hipotesis Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) Berpengaruh Signifikan Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
 Dari hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 5,598 > t_{tabel} sebesar 1,997 dan nilai sig. penelitian 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).
- Uji Hipotesis Variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X2) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
 Dari hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 2,400 > t_{tabel} sebesar 1,997 dan nilai sig. penelitian 0,019 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara variabel kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).
- Uji Hipotesis Variabel Penerapan Good Governance (X3) Berpengaruh Signifikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y)
 Dari hasil perhitungan didapatkan nilai t_{hitung} sebesar 4,684 > t_{tabel} sebesar 1,997 dan nilai sig. penelitian 0,000 < 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan antara variabel penerapan good governance (X3) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y).

Hasil Uji F (Uji Simultan)

Uji F atau dikenal dengan uji simultan bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh semua variabel bebas (independen) dalam hal ini penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur pemerintah daerah dan *good governance* secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat (dependen) yaitu kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan data didapatkan nilai F_{hitung} sebesar $36,212 > F_{tabel}$ sebesar $2,75$ dan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh signifikan secara simultan antara variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) dan penerapan *good governance* (X3) terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Y). Dengan demikian model regresi sudah layak dan benar.

Hasil Koefisien Determinasi (R²)

Setelah variabel independen dinyatakan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah, maka untuk melihat seberapa besar pengaruhnya dapat dilihat pada data hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS seperti terlihat di bawah ini.

Berdasarkan data menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* adalah $0,608$ atau sama dengan $60,8\%$. Temuan ini meindikasikan bahwa perubahan variabel standar akuntansi pemerintahan (X1), kompetensi aparatur pemerintah daerah (X2) dan penerapan *good governance* (X3) dapat menjelaskan perubahan variabel kualitas laporan keuangan daerah (Y) sebesar $60,8\%$, sedangkan sisanya sebesar $39,2\%$ ($100\% - 60,8\%$) dijelaskan oleh variabel lain di luar model ini.

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang di terapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah suatu rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak saat transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Dinas Kota Palangka Raya. Laporan keuangan daerah yang dilaporkan ber basis akrual dan mampu menyediakan informasi untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan serta menyajikan informasi mengenai laporan realisasi mengenai belanja yang dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, maka memberi manfaat dalam memudahkan pengambilan keputusan.

Adanya laporan arus kas menyajikan secara lengkap mengenai aktivitas pendanaan, mengakui persediaan, dan mengakui aset tetap yang mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal agar laporan keuangan yang disajikan bersifat netral (tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak lain). Mengakui suatu benda berwujud sebagai konstruksi serta mengklasifikasikan suatu kewajiban jangka pendek dan jangka panjang guna memudahkan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yohanes Suhardjo (2013) dan Eka Danofi R. (2012), yang menyatakan bahwa penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Aparatur adalah perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); negara alat kelengkapan negara terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari; pemerintah pegawai negeri; alat negara; aparatur negara. Kegagalan Aparatur Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah.

Hasil penelitian di Dinas Kota Palangka Raya menunjukkan bahwa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Kemampuan berpikir yang dilandasi keterampilan dan pengetahuan sesuai bidangnya dapat membuat laporan keuangan

yang disajikan secara lengkap dan menggunakan bahasa yang bersifat umum (mudah dipahami) guna memudahkan pengambilan keputusan.

Dalam pengelolaan keuangan daerah yang baik, Dinas Kota Palangka Raya memiliki sumber daya manusia yang kompeten, yang didukung dengan memiliki pikiran atau ide dan kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mental pada saat mengerjakan setiap tugas dan pekerjaan agar laporan keuangan yang disajikan menggunakan bahasa yang bersifat umum guna memudahkan pengambilan keputusan. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Mia Oktarina (2016) dan Yohanes Sudharjo (2013) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Good Governance atau pemerintahan yang baik menjadi hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap bangsa. *Good* dalam *Governance* mengandung pengertian aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efisien dan efektif dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Good Governance* di Dinas Kota Palangka Raya berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Instansi menerapkan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan anggaran sehingga laporan keuangan yang disajikan bersifat netral (tidak ada informasi yang menguntungkan beberapa pihak, yang akan merugikan pihak lain. Memiliki sumber daya manusia yang dapat mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif (menyesuaikan diri) sehingga laporan keuangan yang disajikan menggunakan bahasa yang bersifat umum (mudah dipahami).

Semakin baik penerapan *Good Governance* akan membuat kualitas laporan keuangan meningkat dan semakin baik. Maka memiliki pimpinan yang dapat memberikan manfaat kepada individu dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan aktivitas serta ditunjang dengan alat atau media dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan mudah dipahami.

Demi mencapai pemerintahan yang baik dapat menggunakan cara kerja yang dipakai dalam melaksanakan pekerjaan sesuai metode kebijakan dan pengendalian manajemen sehingga laporan keuangan bersifat netral. Penelitian ini didukung oleh Mia Oktarina (2016) dan Shannaz Erdina Suryadi (2013) yang menyatakan bahwa *Good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan *Good Governance* Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Upaya Dinas Kota Palangka Raya untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan fungsi akuntansi berupa pengelolaan laporan keuangan daerah sehingga dalam penyajiannya dapat dipertanggungjawabkan dan harus memiliki sumber daya yang kompeten, yang di dukung dengan latar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pendidikan dan pelatihan, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan menerapkan sistem akuntansi yang ada. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan juga tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan daerah sebagai acuan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan *Good Governance* dengan melakukan peningkatan sumber daya manusia, Selain itu pemerintah daerah disarankan untuk selalu mencatat dan menyajikan transaksi atau peristiwa lain sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN (10 PT)

Kesimpulan

1. Terdapat pengaruh antara Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) di Kota Palangka Raya.
2. Temuan menunjukkan adanya pengaruh antara Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X2) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) di Kota Palangka Raya.
3. Bukti empiris membuktikan pengaruh yang positif antara *Good Governance* (X3) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) di kota Palangka Raya.

4. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat pengaruh antara Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y) di kota Palangka Raya.

Saran

1. Bagi Dinas-Dinas di Kota Palangka Raya

Mempertahankan penerapan standar akuntansi pemerintahan agar pelaksanaan pemerintahan berjalan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat untuk dipertanggungjawabkan. Pada variabel Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah didapati nilai item skor rata-rata rendah berdasarkan analisis deskriptif pada bagian kuesioner nomor 2 ($X_{2.2}$) yang menyatakan bapak/ibu memiliki kepercayaan diri dalam keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki untuk melaksanakan setiap tugas dan pekerjaan ditempat kerja sebesar. Artinya bahwa aparatur pemerintah daerah perlu mengikuti pelatihan yang merupakan suatu program yang diharapkan dapat memberikan rangsangan/stimulus kepada seseorang untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam pekerjaan tertentu dan memperoleh pengetahuan umum dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan kerja dan organisasi. Berdasarkan analisis deskriptif yang Penerapan Good Governance (X_3) di Dinas Kota Palangka Raya telah terwujud dengan baik, pemerintah diharapkan selalu tetap menunjang alat atau media dan mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah dalam melaksanakan anggaran dalam mencapai tujuan.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Variabel yang di gunakan penelitian ini terbatas, oleh karena itu bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain yang berhubungan dengan Kualitas Laporan Keuangan
- b. Jumlah sampel dalam penelitian ini masih terlalu sedikit. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel sehingga gambaran hasil penelitian lebih mendekati kondisi yang sebenarnya.
- c. Melengkapi metode penelitian dan melakukan wawancara secara langsung agar memperoleh data yang lebih akurat

References

- Abdul Halim (2007), Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Daerah), Jakarta: Salemba Empat Abdul.
- Abdullah, Thamin & Francis Tantri. 2012. Manajemen Pemasaran, Jakarta: Rajawali pers.
- Ade Saputra. 2015. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.
- Adhi. Daniel Kartika dan Suhardjo Yohaner "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintahan Kota Tual). ISSN: 2252-7826). Volume 5 No 1. Semarang: STIE Semarang.
- Adrian Farros Elfauzi. 2019. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit terhadap kualitas laporan keuangan (studi empiris pada SKPD Kabupaten Demak)
Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.
- Azlim, dkk, 2002. "Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh."
- Batian Indra 2010. Sistem Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Salemba Empat
- Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah pada Jurnal WIDYA Ekonomika, (2017), Pengaruh Good Governance, penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata.
- Desmaria Puji. 2017. Pengaruh *good governance*, penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal pemerintahan dan kompetensi aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah pada satuan kerja kementerian pariwisata.
- Dhedy Triwardana. 2017. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan (studi pada pemerintah daerah Kabupaten Kamar)

- Dicky Rahman. 2015. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
- Eka Danofi R. 2014. Pengaruh pemahaman atas penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.
- Eko Setiawan, 2013. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan. JOMFEKON ISSN 2355-66854 Vol.1 No.2
- Halim, Abdullah. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat:
- Kasmin, (2012), Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: PT Raja Gavindo Persada. Mardi, 2011. Sistem Informasi Akuntansi, Bogor: Ghalio.
- Mardiasmo, 2002. Tata Pemerintahan (*Good Governance*)
- Mardiasmo. 2004. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Ardi. Yogyakarta.
- Mia Oktarina, (2016) pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan *good goernance* terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, Cetakan kedua. Bandung: Refina Aditama.
- Mursyidi. 2010. Akuntansi Dasar Bogor: Ghalio Indonesia.
- Nazir Mohammad, 2011. Metode Penelitian, Cetakan G. Bogor: Peneribit Ghalio Indonesia.
- Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti. 2014. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi kasus pada skpd buleleng).
- Rita Andiani, SE, MM. 2016. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan di kota semarang.
- Rukmi Juita. 2013. Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Informasi
- Shannaz Erdina Suryadi. 2013. Pengaruh *good governance* dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- Sugiyono, 2013, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RKD. Bandung: Alfabeta
- Sutiono, Agus dan Ambar T.S., 2004. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah dalam Birokrasi Publik di Indonesia, Gava Media, Edisi Pertama PP. 20-26 Undang-Undang No.17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- T. Asri Yunita. 2015. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, Sistem pengendalian internal dan kompetensi staf Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah (studi pada skpd kota dumai).
- Yohanes Suhardjo. 2013. Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas aparatur pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan (studi kasus pada pemerintahan kota tual).
- Yujana, Lalu Hendri., 1999. Akuntansi Pemerintahan Edisi Kedua Lembaga Peneribit FEUI, Jakarta.
https://onsearch.id/Record/IOS3183.44941?widget=1&repository_id=585
<http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/711/ibptunikompp-gdl-hakikianni-35511-10-unikomh-1.pdf>
<http://repositorv.unissula.ac.id/6338>
<https://media.neliti.com/media/publications/124913-ID-pengaruh-penerapan-standar-akuntansi-pem.pdf>
<https://core.ac.uk/download/pdf/154927715.pdf>